

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM  
MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM  
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Ainil Farhani**

**NIM. 190802072**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ainil Farhani

NIM : 190802064

Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir: Lukup, 20 Juni 20 Desa Bukit Pepanyi, Kec. Wih Pesam,  
Kab. Bener Meriah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Desember 2023



Yang Menyatakan,

**Ainil Farhani**

NIM. 190802072

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM**  
**MENGATASI KEMISKINAN EKSTRIM DI**  
**KABUPATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (SI) Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**AINIL FARHANI**

**NIM. 1908002072**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.**  
**NIP. 1961110051982031007**

  
**Nasrul Hadi, S.E., M.M**  
**NIDN. 1313129301**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**  
**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENGATASI**  
**KEMISKINAN EKSTRIM DI KABUPATEN BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Adminitrasi Negara

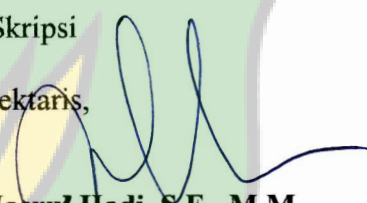
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023 M  
7 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
**Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.**  
NIP. 19110051982031007


Sektaris,

  
**Nasrud Hadi, S.E., M.M.**  
NIDN. 1313129301

Penguji I,

  
**Dr. Muslim, M.Si.**  
NIP. 196610231994021001

Penguji II,

  
**Safwan, S.E., M.Si.**  
NIDN. 132107801

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Muji Mulia, M.Ag.**  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Kemiskinan secara umum merupakan hal yang sangat sulit diatasi, apalagi bagi negara berkembang. Kemiskinan menjadi kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi miskin. Peran pemerintah sendiri dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang dapat menekan angka kemiskinan didaerah. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Rumusan masalah bagaimana strategi pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Apa faktor pendukung dan penghambat hambatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa pengumpulan data, observasi, wawancara. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kepala Desa, serta wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem sudah mengimplementasikan program-program untuk menekan angka kemiskinan. Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem ditandai dengan berjalannya Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya. Namun dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah juga terdapat kendala yakni tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan dan perkembangan diri masih sangat rendah sehingga hal tersebut membuat masyarakat selalu berjalan dibawah angka kemiskinan. Faktor penghambat selanjutnya ialah keterbatasan lapangan pekerjaan yang disebabkan rendahnya SDM masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yaitu melalui beberapa program yang dirancang untuk meminimalkan dampak yang telah timbul dari kemiskinan ekstrem sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

*Kata Kunci: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Strategi, Kemiskinan Ekstrem, Dinas sosial*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kemiskinan di Desa Bukit Pepanyi Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah Kasus Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Peneliti menyadari bahwa Penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua Peneliti Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Idawati serta segenap keluarga Peneliti yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materiil.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai Islami.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas materiil Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, beserta Wakil Dekan 1,2 ,3. 4.
4. Muazzinah. B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan Peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Nasrul Hadi, S.E., MM., selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan Peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah senantiasa memberikan pengajaran dan didikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proses belajar mengajar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada Sarah Faradilla, Aris Fadillah, Zahratul Jannah, Ilham dan Sulaimi yang telah kebersamai Peneliti pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetapi kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah sampai akhir.
9. Kepada teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan semangat, motivasi, dan kasih baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menemani Peneliti selama proses Penelitian Skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat Peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 07 Desember 2023

Peneliti

AinilFarhani  
190802072

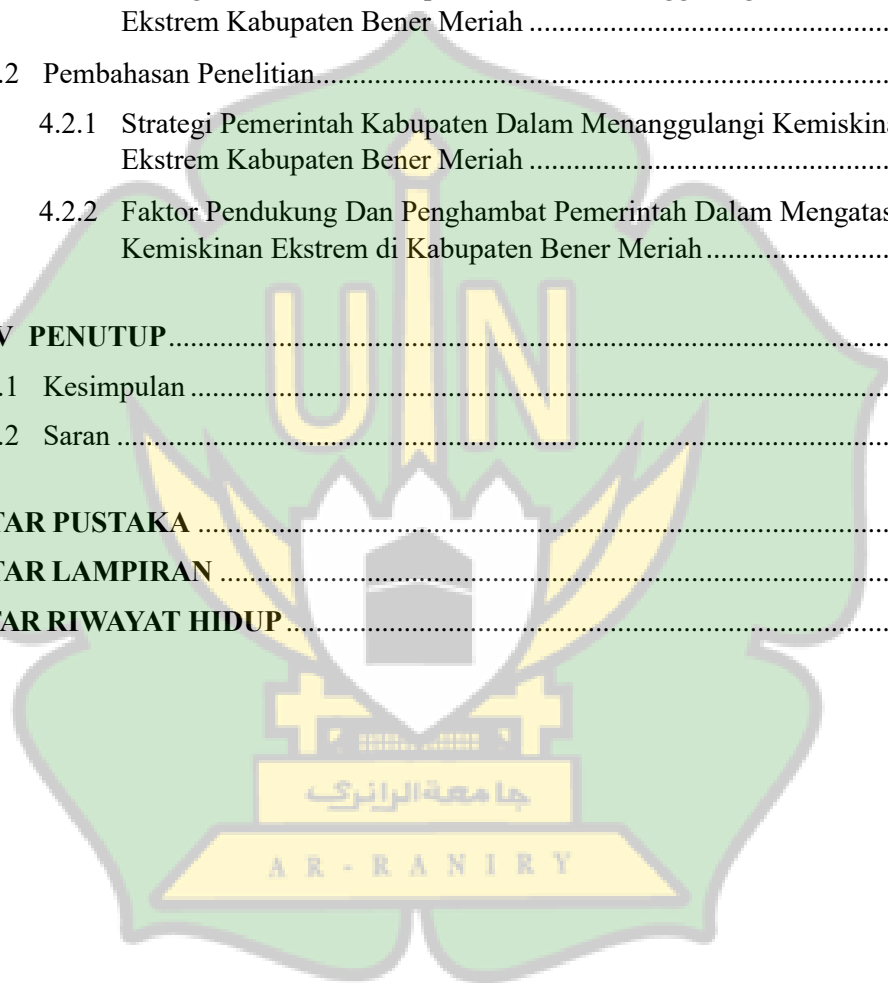


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Teori Kemiskinan.....	10
2.3 Konsep Strategi.....	14
2.4 Pemerintah Daerah.....	16
2.5 Konsep Sosial.....	18
2.6 Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	20
3.3 Lokasi Penelitian.....	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5 Informan Penelitian.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24



3.7	Teknik Pengelolaan Data .....	25
3.8	Teknik Keabsahan Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>28</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	28
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
4.1.2	Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bener Meriah .....	32
4.2	Pembahasan Penelitian.....	57
4.2.1	Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bener Meriah .....	58
4.2.2	Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>64</b>
5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>74</b>



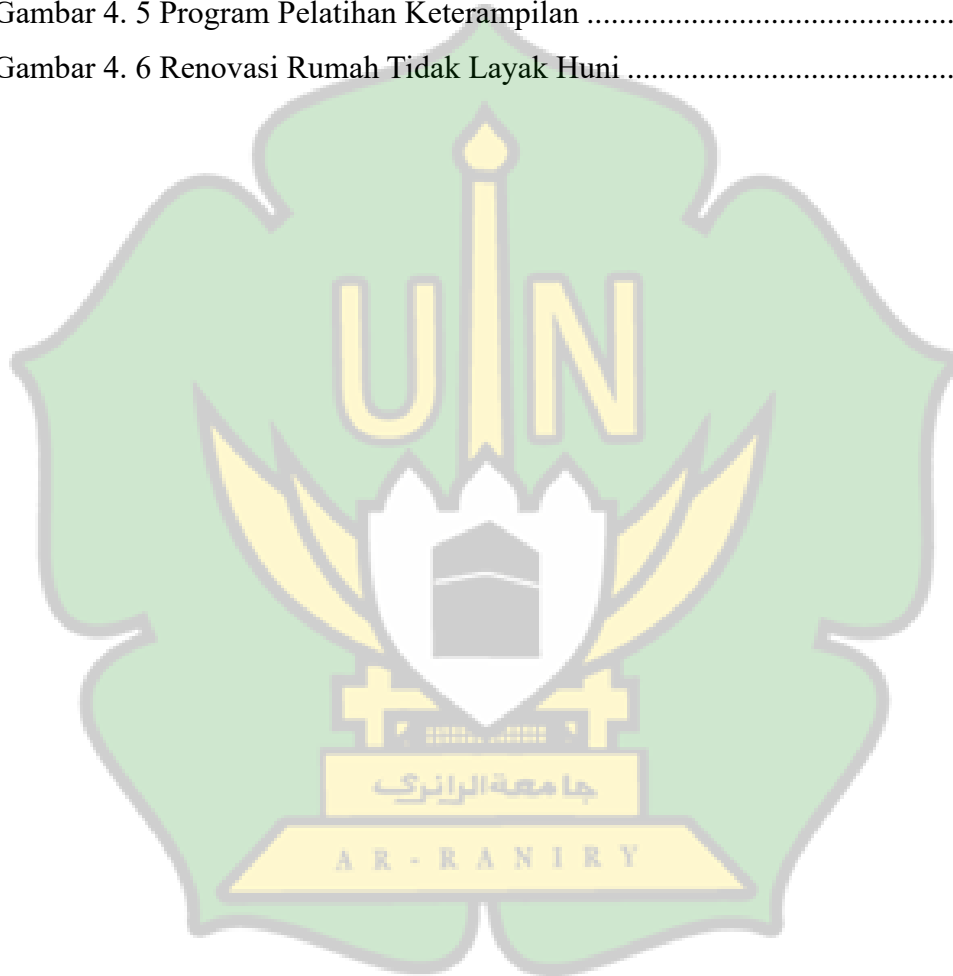
## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem yang ada di Aceh .....	4
Tabel 2. 1 Kategori Kemiskinan Ekstrem .....	13
Tabel 3. 1 Strategi Pemerintah Bener Meriah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem .....	21
Tabel 3. 2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem .....	21
Tabel 3. 3 Informan .....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah .....	28
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah .....	32
Gambar 4. 3 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) .....	38
Gambar 4. 4 rogram Bantuan Pangan Non Tunai .....	38
Gambar 4. 5 Program Pelatihan Keterampilan .....	41
Gambar 4. 6 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	69
Lampiran 2 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	70
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian.....	72
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	73



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang masalah**

Pada dasarnya kemiskinan secara umum merupakan hal yang sangat sulit diatasi, apalagi bagi negara berkembang. Kemiskinan menjadi kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi miskin. Menurut Critianto Leasiwal menyebutkan bahwa “Kemiskinan pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional”. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Sungkuwo Edy Mulyono mengatakan bahwa “Pada umumnya kemiskinan itu terjadi karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan dari karakter atau tipologi orang miskin”. kemiskinan juga memunculkan masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan, serta kriminalitas Dampak lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya masalah pemenuhan kebutuhan pokok semata, tetapi pendidikan juga ikut terabaikan.<sup>2</sup>

Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya tingkat Pendidikan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan

---

<sup>1</sup> Christianto Leasiwal, Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku. Universitas Pattimura. Vol 7, No 2, Hal 1. Tahun 2017

<sup>2</sup> Sungkuwo Edy Mulyono, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Yogyakarta Tahun. 2017

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan.

Dalam rangka Mengurangi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sehingga di atur dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 04 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterpaduan dan sinergi program merupakan hal yang penting dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini karena kemiskinan ekstrem merupakan masalah yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga atau pemerintah daerah saja.

Kemiskinan Ekstrem adalah sejenis kemiskinan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator Kemiskinan Ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari (setara Rp9.089 per hari). PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Robert Lawang, Buku Materi kemiskinan, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012)

Adapun beberapa kategori warga miskin ekstrem seperti berikut:

1. Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multi dimensi kemiskinan, ciri-cirinya seperti:
  - a. Lansia
  - b. Tinggal sendirian
  - c. Tidak bekerja
  - d. Difabel
  - e. Memiliki penyakit kronis/menahun
  - f. Rumah tidak layak huni
  - g. Tidak memiliki fasilitas air bersih
  - h. Sanitasi memadai
2. Warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup, ciri-cirinya seperti berikut ini:
  - a. Warga miskin ekstrem produktif (usia 15-64)
  - b. Tidak memiliki penyakit menahun (bukan golongan difabel).

Pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka Kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 26,50 juta jiwa, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia juga menurun menjadi 20.01 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 18,19 juta jiwa. Walaupun angka kemiskinan ekstrem di setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi masih harus di perhatikan.<sup>4</sup>

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan ekstrem tiap tahunnya. Persentase angka penduduk Aceh yang

---

<sup>4</sup> DPRI 20-08-2023 Juta Rakyat RI alami kemiskinan eskترم diakses pada 11 September 2023



berada dalam kategori kemiskinan ekstrem berjumlah 1,83 persen pada tahun 2023. Meskipun jumlah tersebut sudah berkurang dibandingkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 sebesar 2,95 persen.<sup>5</sup>

Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk Kemiskinan Ekstrem yang ada di Aceh:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem yang ada di Aceh

### Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem yang ada di Aceh

No	Kabupaten	Jumlah
1	Bener Meriah	168.000 Jiwa
2	Aceh Jaya	12.000 Jiwa
3	Aceh Tamiang	6.230 Jiwa
4	Aceh Barat	22.1186 Jiwa

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu kabupaten yang dikategorikan dalam Kemiskinan Ekstrem yang tinggi dengan jumlah 168.000 jiwa, dengan demikian pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus memperhatikan lebih lagi dalam hal menanggulangi kemiskinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil data yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa Kabupaten Bener Meriah memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Selanjutnya penelitian ini ditujukan khusus kepada kantor Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem, kemudian Mengetahui

<sup>5</sup><https://humas.acehprov.go.id/bappeda-se-aceh-bahas-upaya-percepatan-penghapusan-kemiskinan> diakses pada 25 Desember 2023

<sup>6</sup> <https://www.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/berita-daerah/pj-bupati-drs-haili-yoga-msi-paparkan-program-p2s-dan-kemiskinan-ekstrem-pada-kemenko-ri> diakses pada 11 September 2023

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah dan mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah”

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah masih belum dapat menekan angka kemiskinan serta angka pendidikan yang masih rendah.
2. Terdapat faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan maka, dapat ditarik rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem.
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Hambatan Pemerintah dalam mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini Peneliti memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambatan Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat membawa manfaat teoretis dan praktis, sebagai pegangan masukan dan pertimbangan dan evaluasi bagi peningkatan pemerintah dari pihak teoretis yang terkait:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai rekomendasi dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah.

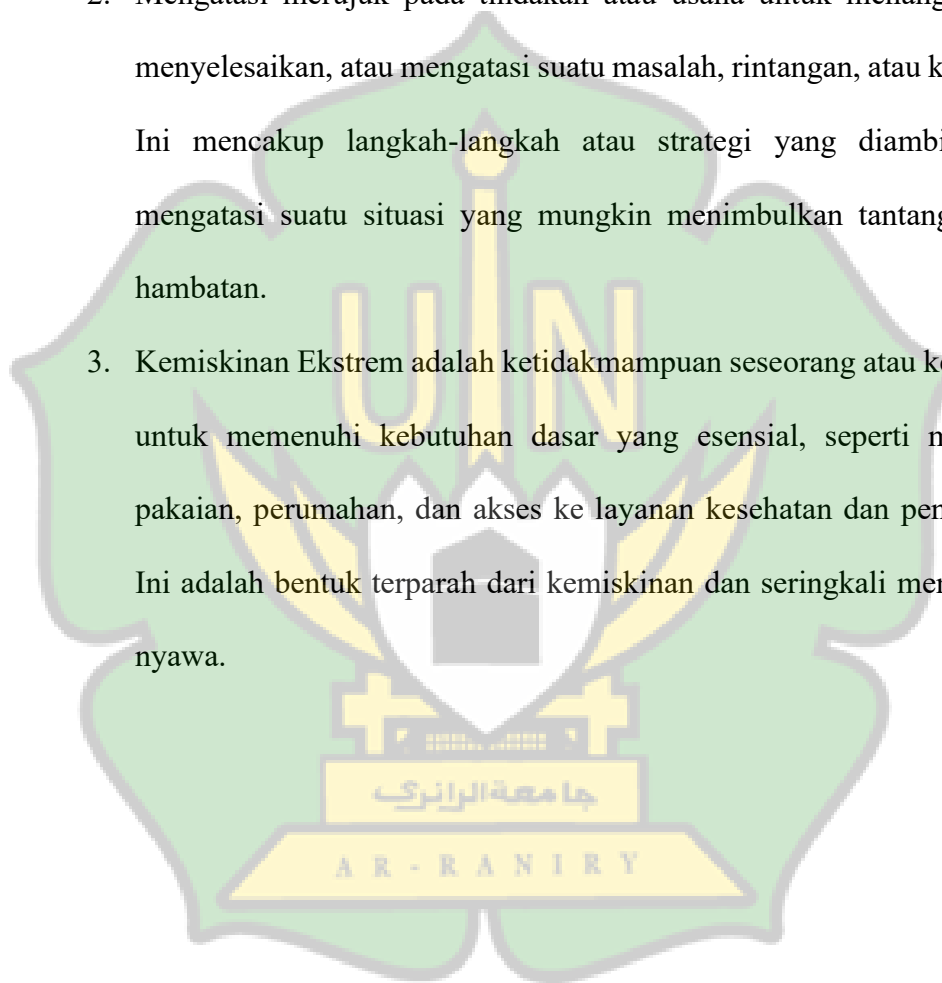
#### **1.5 Penjelasan Istilah**

Pada poin ini peneliti menjelaskan istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan para pembaca untuk memahami penelitian secara komprehensif.

1. Strategi adalah rencana terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan pemilihan tujuan organisasi atau

individu dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Strategi melibatkan pemahaman tentang lingkungan di sekitar kita, sumber daya yang tersedia, dan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya tersebut guna mencapai hasil yang diinginkan.

2. Mengatasi merujuk pada tindakan atau usaha untuk menanggulangi, menyelesaikan, atau mengatasi suatu masalah, rintangan, atau kesulitan. Ini mencakup langkah-langkah atau strategi yang diambil untuk mengatasi suatu situasi yang mungkin menimbulkan tantangan atau hambatan.
3. Kemiskinan Ekstrem adalah ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar yang esensial, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Ini adalah bentuk terparah dari kemiskinan dan seringkali mengancam nyawa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi perbandingan penelitian ini, yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, yaitu menjadi beberapa perbandingan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musmulinda pada tahun (2016), Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul:” Strategi Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.” kesimpulan tersebut adalah: Dalam kegiatan pelaksanaan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng harus memberikan atau mengupayakan sumber daya manusia ini perlu dikelola atau diatur dengan baik agar lebih produktif, dari sisi pendataan kurang akuratnya kegiatan pendataan sehingga masih ada rumah tangga atau penduduk miskin yang tidak terdata termasuk ada juga rumah tangga yang sebenarnya tidak layak tapi terdata. Dari sisi penyaluran tampaknya untuk semua indikator yang digunakan ketetapan jumlah, ketetapan sasaran, dan ketetapan jenis bantuan yang belum optimal. Untuk kualitas pelayanan petugas dinilai sudah cukup baik walaupun belum optimal. Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan Perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada kinerja Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan Ginting pada tahun (2008). Skripsi ini dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Dakwah Medan. Berjudul: “Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Ditinjau Sudut Pandang Islam Di Kelurahan Kota Madya Tebing Tinggi.” Kesimpulan tersebut yaitu: Penelitian ini menjelaskan cara konseptual penanganan yang dilakukan untuk masyarakat miskin, terhadap penanggulangan kemiskinan di kelurahan rambong Kota Madya Tebing Tinggi, dengan salah satu program P2KP bantuan pemerintahan dengan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat kota Tebing Tinggi. untuk memberantas kemiskinan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian tersebut fokusnya terhadap program yang di luncurkan pemerintah yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dimana penelitian tersebut lebih kepada kemiskinan yang ada di perkotaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli dan Cut Mega Putri, pada tahun (2023), Jurnal ini dari mahasiswa Universitas Teuku Umar. Berjudul: “Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue.” Kesimpulan tersebut yaitu: Angka kemiskinan ekstrem sebesar 18, 98% di Kabupaten Simeulue yang tertinggi di Aceh perlu pemerintah daerah setempat membuat program bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial tunai (BST), dan program keluarga harapan

(PKH). Persamaannya ialah peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama Simeulue meneliti tentang kemiskinan ekstrem. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada Peran BAPPEDA dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem.

## 2.2 Teori Kemiskinan

Kemiskinan menurut Edi Suharto merupakan salah satu permasalahan yang global, berarti kemiskinan menjadi suatu aspek penting bagi seluruh dunia. Berbagai Negara pastinya tidak terlepas dari kemiskinan dan kemiskinan itu sendiri adalah salah satu penyakit bagi dunia kemanusiaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan oleh sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi:

1. Modal produktif atas aset, misal tanah perumahan, peralatan dan kesehatan.
2. Sumber keuangan seperti *income* dan kredit yang memadai.

---

<sup>7</sup> Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang, ( Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.14



3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi.
4. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
5. informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara- negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
3. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam

masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya Bias Gender, Diskriminasi, atau Eksploitasi Ekonomi

4. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat. Kemudian masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan masyarakat miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya.<sup>8</sup>

Kemiskinan membuat manusia menderita dan terhambat mengembangkan kemanusiaannya. Penderitaan ini nyata dalam realitas merebaknya kasus-kasus seperti penyakit busung lapar, kekurangan gizi dan penyakit lainnya di beberapa daerah indonesia menurut meneth kelompok yang memiliki ketidak mampuan mengakibatkan masyarakat yang tergolong miskin berperilaku dan berpola hidup

---

<sup>8</sup> Muhtadi Ridwan, Ibid., hlm. 4

miskin, yang pada dasarnya tidak menikmati kemerdekaan untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi.<sup>9</sup>

### 2.2.1 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem menjadi suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, seperti makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk berpendapatan di bawah *US\$1,91 PPP (purchasing power parity)* per kapita per hari (setara Rp9.089 per hari).

Berikut merupakan tabel kategori Kemiskinan Ekstrem:

**Tabel 2. 1**

#### **Kategori Kemiskinan Ekstrem**

No	Kategori	Hari	Bulan
1	Perorangan	Rp.10.739.00	Rp.322.170.00
2	Keluarga	-	Rp.1.288.680.00

*Sumber : Peraturan BPK.go.id Tahun 2022*

Dalam tabel di atas menjelaskan bahwa seseorang dapat di kategorikan ke dalam kemiskinan ekstrem jika pendapatannya nya dibawah Rp10.739, /orang/hari atau Rp322.170, -/orang/bulan, sehingga misalnya dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak) memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau dibawah Rp1.288.680, per keluarga per bulan

Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem, seperti akses terhadap sumber ekonomi hambatan struktural terhadap sumber mata pencaharian merupakan penyebab utama kemiskinan ekstrem sulit untuk dihapuskan. Kemudian

<sup>9</sup> Meneth, Pengembangan Masyarakat Desa, (Penerbit USU Press: Medan, 2018), hlm. 45

pemenuhan kebutuhan gizi seimbang dan hidup sehat kurang gizi membuat kondisi penduduk miskin ekstrem mengalami pertumbuhan intelektual yang lambat dan menjadi kurang produktif.

Selain itu, kurangnya pemahaman pentingnya hidup sehat dan ketiadaan jaminan kesehatan membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi akibat kondisi kesehatan. Akses dan informasi tentang pendidikan Keterbatasan akses dan informasi pentingnya pendidikan menghambat individu untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal.

Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan dan kemampuan berkompetisi di pasar kerja. Dan juga akses infrastruktur dan transportasi keluarga miskin ekstrem mempunyai akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar dan layanan transportasi yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Sebagai contoh, kesulitan akses jalan yang baik dan transportasi murah membuat petani kurang berdaya saing untuk menjual produknya sehingga pendapatannya rendah.<sup>10</sup>

### **2.3 Konsep Strategi**

Dalam suatu usaha menjalankan strategi yang terencana untuk mencapai tujuan lewat tertentu untuk kepentingan tertentu dari organisasi atau pun perorangan pastinya dibutuhkan suatu manajemen agar tujuan dari organisasi bisa tercapai sesuai rencana. Sementara itu, manajemen merupakan strategi yang digunakan pemimpin dalam mengimplementasikan kemampuannya pada suatu organisasi.

---

<sup>10</sup> Nasikun, Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, 2018

Manajemen dalam makna pengelolaan organisasi dipahami dalam arti menyeluruh yaitu, yang meliputi berbagai dimensi diantaranya; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, oleh George R. Terry diistilahkan dengan POAC, yang merupakan singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* :<sup>11</sup>

- a. *Planning* atau perencanaan adalah kegiatan yang menentukan sasaran yang hendak dicapai, dan memikirkan cara serta penentuan penggunaan sarana dalam pencapaian sarana tersebut.
- b. *Organizing* atau pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material.
- c. *Actuating* atau penggerakan merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran.
- d. *Controlling* atau pengawasan, merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan agar para anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik, dan pergerakan yang sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi.

### **2.3.1 Pengertian Strategi**

Strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos

---

<sup>11</sup> Abbas, Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14

dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan Ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Ismail Sholihin dalam buku karya Ahmad yang berjudul Manajemen Strategis mendefinisikan bahwa strategi berasal dari kata Yunani “strategos” yang berasal dari kata “stratus” (militer) dan “ag” (kepemimpinan). Kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan jenderal dalam mengembangkan rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang adalah definisi asli dari strategi. Menurut Natang Fatah dalam buku karya Ahmad yang berjudul Manajemen Strategis menyatakan bahwa strategi adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>12</sup>

#### **2.4 Pemerintah Daerah**

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad, Manajemen Strategis (Makassar: Nass Media Pustaka, 2020),

<sup>13</sup> Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2016), h. 46

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara.<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari orang-orang pemegang kekuasaan di dalam Negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ Negara tersebut baik secara vertikal maupun secara *horizontal* untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah. wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>14</sup> C.S.T kamsil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2017), h. 91

<sup>15</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, 2014. hlm.145



pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2.5 Konsep Sosial

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat, dimana dirasa perlu adanya komunikasi antar individu.<sup>16</sup> Dari kata diatas dapat dilihat bahwa arti dari kata sosial terdapat dua arti yaitu yang pertama berkenaan dengan masyarakat dan yang kedua berkenaan dengan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya).

Konsep sosial adalah konsep sehari-hari yang di gunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang di pahami secara umum dalam masyarakat. Sosial dalam pengertian umum mengenai Masyarakat atau kemasyarakatan mengemukakan bahwa sosial adalah berkenaan dengan perilaku atau yang berkaitan dengan proses sosial. Jadi sosial berarti mengenai keadaan Masyarakat. Dengan demikian dapat di katakan bahwa kehidupan sosial berarti suatu fenomena atau gejala akan bentuk hubungan seseorang atau segolongan orang dalam menciptakan hidup Masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Konsep Sosial diakses pada September 07, 2023 dari : <http://kbbi.web.id>

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, 2003 Perkenalkan Sosiologi hal 464, Jakarta: Raja Wali Press

Sosial adalah suatu keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain dengan hadirnya orang lain maka akan menghadirkan suatu interaksi sosial yang merupakan bentuk hubungan sosial antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hubungan Masyarakat dapat di lihat dalam hubungan *gemeinschaft* (paguyuban) merupakan suatu bentuk kehidupan Bersama dimana anggota - anggotanya diikat oleh hubungan batin dan bersifat kekal.<sup>18</sup>

Menurut Gilarso mengatakan sosial adalah manusia sebagai makhluk hidup mempunyai naluri untuk senantiasa hidup Bersama dalam lingkungannya yaitu masyarakat dan alam. Kehidupan sosial dalam kehidupan Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan Bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin dan berkembang sebagai suatu kesatuan yang harmonis.<sup>19</sup>

## 2.6 Kerangka Pemikiran



<sup>18</sup> Agustiono Leo 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Hal 7. Bandung: Alfabeta

<sup>19</sup> Gilarso, T 2017 Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan persepsi.<sup>20</sup> Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu peneliti memberikan pemahaman secara mendalam dan mendetail tentang obyek yang akan di teliti serta memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

<sup>21</sup> Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian*, (/t.k./: Rake Sarasin, 2018), p. 54

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat Strategi Pemerintah Kabupaten dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah

**Tabel 3. 1**  
**Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem**

No	Dimensi	Indikator
1	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</li> <li>b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil</li> <li>d. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya.</li> </ul>
2	Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat Tinggal</li> <li>b. Pendidikan</li> </ul>

*Sumber: Keputusan Menteri Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI No 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 Tentang Penangan Fakir Miskin*

**Tabel 3. 2**  
**Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem**

No	Dimensi	Indikator
1	Faktor Pendukung	a. Anggaran Pemerintah
2	Faktor penghambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesadaran Masyarakat</li> <li>b. Lapangan Kerja</li> </ul>

*Sumber: Keputusan Menteri Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI No 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 Tentang penangan Fakir Miskin*

### 3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan lokasi penelitian wilayah Provinsi Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang beralamat pada jalan Komplek Perkantoran PEMDA Serule Kayu - Radelong. Alasan Peneliti melakukan penelitian di kantor tersebut karena Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah,

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer data sekunder dengan proposi sesuai dengan tujuan penelitian ini:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data yang akan diperoleh melalui observasi dan juga dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat Kepala Desa, serta wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian

terdahulu, buku, dan data BPS dari tahun 2021-2023. Adapun data sekunder yang diperoleh berupa daftar kepegawaian kantor Dinas Sosial, data warga yang memperoleh bantuan sosial, serta data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi atau data yang relevan dengan topik penelitian. Informan penelitian dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh penelitian.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 4 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 3 Informan**

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial)	1 orang
2	Kepala Desa Syura Jadi	1 orang
3	Kepala Desa Suka Jadi	1 orang
4	Kepala Desa Bukit Pepanyi	1 orang
5	Masyarakat (penerima manfaat)	2 orang
<b>Total</b>		<b>6 orang</b>

*Sumber : Data diolah tahun 2023*

<sup>22</sup> Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) p. 67

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan atau responden sesuai dengan informasi dan jenis data yang di butuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai suatu masalah tertentu bertukar ide melalui tanya jawab, sehingga Peneliti mendapatkan makna dalam topik.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Adapun alasan peneliti mewawancarai pegawai Dinas Sosial karena informasi yang didapatkan dari narasumber tersebut berguna dalam tahap analisis data dengan metode triangulasi data yang peneliti lakukan

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, peraturan, kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa

dokumen berupa jumlah pegawai kantor, peta wilayah kerja Dinas Sosial, serta data warga kemiskinan ekstrem yang diperoleh dari desa.

### 3.7 Teknik Pengelolaan Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan. Tujuan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Menurut Moloeng “analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Ada tiga cara dalam teknis analisis data yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses dalam menyeleksi, memilih, menyederhanakan atau mengubah data pada catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah ada.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang memberi kemungkinan adanya sekumpulan informasi yang tersusun nantinya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses yang sangat penting dalam penelitian, kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus



penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan intisari dan pendapat akhir dari kegiatan sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, namun peneliti tidak mengadopsi secara keseluruhan teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut, melainkan peneliti memilih teknik pemeriksaan keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian. Berikut teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam pembahasan penelitian yaitu:

Tujuan validitas data adalah untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Menurut Sugiono, dalam uji kredibilitas ini, triangulasi diartikan sebagai pengecekan informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan informasi dan waktu. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan melihat informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Peneliti kemudian membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Teknik triangulasi menggunakan teknik yang berbeda untuk memverifikasi data dari sumber yang sama. Dalam hal ini informasi diperoleh melalui wawancara dan diverifikasi melalui observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data memberikan informasi yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau orang lain untuk menentukan informasi apa yang diyakini benar atau apakah semua informasi mungkin benar karena perspektif yang berbeda.
3. Triangulasi waktu seringkali juga mempengaruhi kredibilitas informasi. Pengumpulan data melalui teknik wawancara di pagi hari, ketika informan masih segar, memberikan informasi yang lebih valid tentang beberapa isu dan karenanya kredibel. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data melalui wawancara, observasi atau teknik lainnya dapat dilakukan pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil tes memberikan informasi yang berbeda, maka diulang beberapa kali untuk mendapatkan kepastian informasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



**Gambar 4. 1 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah**

**Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2023**

Dinas Sosial merupakan Instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan perorangan, kelompok, dan Masyarakat. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah diatur dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.

Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah terletak di salah satu desa yang ada di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tepatnya di jalan Serule Kayu.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas di maksud maka Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- 2) Penelitian program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;
- 3) Perumusan, perencanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur
- 4) Penyelenggaraan, kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial

- 5) Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial
- 6) Penyelenggaraan pembangunan, pengawasan dan pengendalian saran dan prasarana di bidang sosial
- 7) Penyelenggaraan operasional pelayanan di bidang sosial meliputi rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan penanganan fakir miskin.
- 8) Penerbitan rekomendasi izin di bidang sosial
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kesejahteraan sosial
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kesejahteraan sosial
- 12) Pembinaan UPTD
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>23</sup>

## **B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah**

Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah memiliki Visi “Menjadi lembaga yang profesional dan prima dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

---

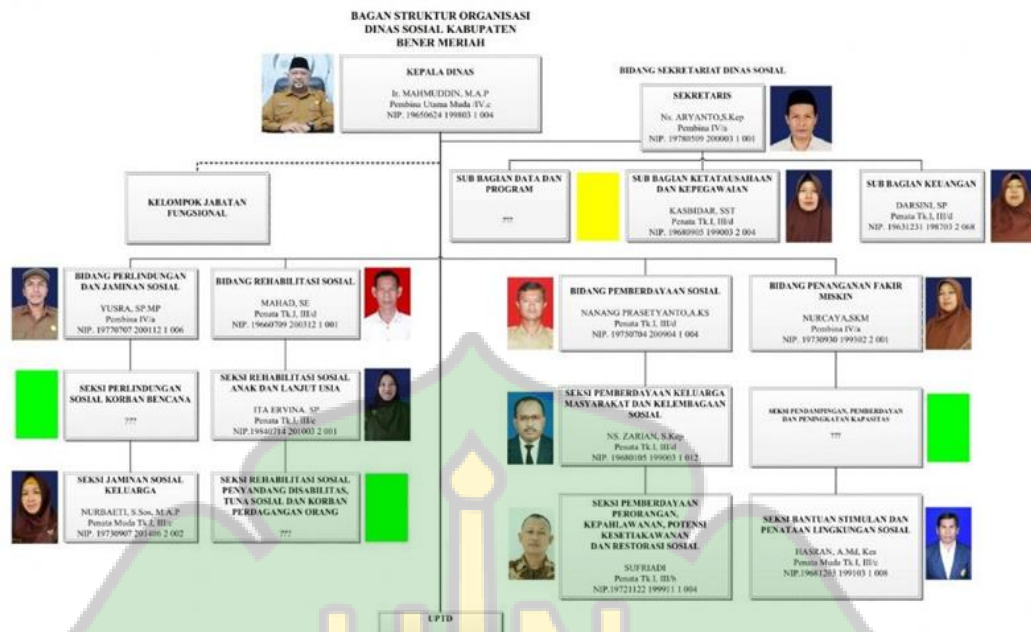
<sup>23</sup> Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah

menuju masyarakat mandiri, Islami, harmoni, dan sejahtera.” Serta memiliki misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, adil dan terjangkau dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
2. Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kemitraan sosial dan kemitraan dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan Masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem jaringan informasi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
4. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana dan pemberian usaha desa.
5. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa.
6. Mendorong perkembangan sistem pembangunan partisipatif.
7. Membantu peran aktif Dinas Sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat.
8. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan pegawai.

### **C. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah**

Struktur organisasi merujuk pada struktur formal dan hierarki suatu organisasi, yang mencakup bagaimana tugas, tanggung jawab dan kekuasaan didistribusikan di antara anggotanya. Struktur organisasi ini menentukan bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah mengalirkan informasi, membuat keputusan, dan sumber daya yang dialokasikan.



**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah**  
*Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2023*

#### 4.1.2 Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bener Meriah

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana individu atau kelompok mengalami keterbatasan ekstrem dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pakaian, akses kesehatan, dan pendidikan. Ini mencirikan tingkat kemiskinan yang sangat parah, dimana kekurangan sumber daya menciptakan kondisi yang mengancam kelangsungan hidup. Sudah menjadi kewajiban setiap pemerintahan untuk melindungi masyarakatnya dari kemiskinan dan berupaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Diperlukan kerja sama lintas sektor pemerintahan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Dalam mengatasi kemiskinan yang melanda Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Kabupaten



Bener Meriah membekali masyarakat agar memiliki keterampilan kerja dan memberikan bantuan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah mengatakan “Kami telah mengambil serangkaian langkah konkrit, termasuk identifikasi dan pemetaan penerima bantuan, program pelatihan keterampilan, serta bantuan finansial dan layanan yang bersifat mendesak<sup>24</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah sangat berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Untuk dapat melihat dan menganalisis bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah peneliti menggunakan 2 dimensi yang telah peneliti tetapkan sebagai fokus pada penelitian ini yaitu strategi dan kemiskinan.

### **1. Strategi**

Mengatasi kasus kemiskinan ekstrem dibutuhkan sebuah strategi yang benar-benar matang. Langkah awal yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah adalah melakukan pendekatan yang terarah dengan mengidentifikasi secara cermat individu atau keluarga yang memerlukan bantuan. Proses identifikasi ini melibatkan survei mendalam terkait kondisi ekonomi, perumahan dan akses ke layanan dasar. Proses ini berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik setempat untuk memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian Dinas Sosial Kabupaten

---

<sup>24</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023



Bener Meriah membuat pemetaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencakup kelompok yang dibutuhkan.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah menyebutkan bahwa:

“Langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan krusial ini (Kemiskinan Ekstrem) ialah dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data kemiskinan di Bener Meriah, hal tersebut agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai target.”<sup>25</sup>

Pada dasarnya koordinasi dengan BPS ialah untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kemiskinan, hal ini dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kab. Bener Meriah agar dapat mengetahui data-data kemiskinan yang ada di Kab. Bener Meriah untuk dapat dilakukan penanganan secara tepat sasaran. Dengan demikian langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dapat berjalan dengan lancar. Adapun program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan sebagai berikut:

”Program yang kami jalankan untuk menjawab permasalahan ini bisa digolongkan dalam 4 jenis yaitu Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya. Hal ini melibatkan penyaluran dana secara langsung maupun tidak langsung (Non Tunai) kepada keluarga yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti makanan dan kebutuhan kesehatan mendesak.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

<sup>26</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 jenis program strategi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yaitu Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya.

a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Bener Meriah mencakup dukungan finansial, pangan, perumahan, dan layanan kesehatan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Program-programnya yaitu:

- 1) Sembako murah dua kali dalam setahun
  - 2) Pembangunan rumah layak huni (RLH)
  - 3) Beasiswa keluarga miskin
  - 4) Bantuan sosial peralatan sekolah keluarga miskin dan penyandang cacat
  - 5) Bantuan rumah tangga miskin, lansia terlantar Rp, 200.000, perbulan
- Serta bantuan sosial kepada yatim piatu dan masih banyak lainnya.

Dengan adanya bantuan program-program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memperbaiki angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah serta terbantunya perekonomian masyarakat. Karena bantuan seperti bantuan

Rumah Layak Huni (RLH) dan pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap kepala keluarga. Sehingga keluhan-keluhan masyarakat merasa didengar dan terpenuhi terpenuhi, dan adanya kepuasan masyarakat dengan kepemimpinan Pemerintahnya.

Hal ini senada hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah menjelaskan bahwa:

”Program bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah antara lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai seperti beras, susu dan rumah layak huni. Semua bantuan tersebut melibatkan lintas sektor pemerintahan”<sup>27</sup>

Selain itu, hasil wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi menyebutkan Bahwa :

“Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam membantu masyarakat miskin dengan menyelenggarakan bantuan BLT, bantuan non tunai dan sebagainya. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam memenehi kebutuhan sehari-hari.”<sup>28</sup>

Hal tersebut sebagaimana didukung dengan pernyataan Kepala Desa Bukit Pepanyi menyebutkan bahwa:

”Memang benar adanya, kami berkolaborasi dengan Dinas Sosial dalam proses identifikasi penerima manfaat, evaluasi program, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menciptakan dampak yang signifikan terhadap angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah. Terkait respon masyarakat, kebanyakan responnya positif. Program bantuan ini juga membantu masyarkat dalam pemenuhan kebutuhan pangan.”<sup>29</sup>

<sup>27</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi, pada tanggal 25 oktober 2023

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

Hal ini juga didukung sebagaimana wawancara peneliti pernyataan dari Kepala Desa Suka Jadi menyebutkan bahwa “Dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti BLT,PKH ini sangat membantu kondisi ekonomi masyarakat di sini dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”<sup>30</sup>

Pernyataan lainnya oleh salah satu masyarakat Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa “Alhamdulillah saya masyarakat sangat terbantu dengan adanya perhatian dari pemerintah dengan bantuan yang diberikan dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan program bantuan sosial dengan pendekatan yang holistik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan melibatkan kerja sama lintas sektor. Hal ini memberikan gambaran tentang komitmen mereka untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

Berikut merupakan gambar Program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Bener Meriah:

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan kepala desa Suka Jadi, pada tanggal 24 oktober 2023

<sup>31</sup> Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 19 desember 2023



**Gambar 4. 3 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Sumber: <https://dinsos.benermeriahkab.go.id/galeri/gambar/penyaluran-kks-bpnt-ppkm-kecamatan-bandar>



**Gambar 4. 4 rogram Bantuan Pangan Non Tunai**

*Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2023*

Berdasarkan dokumen tersebut diatas peneliti dapat menganalisa bahwa dengan adanya bantuan program-program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memperbaiki angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah serta

terbantunya perekonomian masyarakat. Karena bantuan seperti bantuan subsidi pangan, bantuan rumah layak huni (RLH), bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap kepala keluarga. Sehingga keluhan-keluhan masyarakat merasa didengar dan terpenuhi terpenuhi, dan adanya kepuasan masyarakat dengan kepemimpinan Pemerintahnya. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan Dinas Sosial merupakan unsur kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektifitas program-program ini dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah.

b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat miskin sangat penting untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan berkelanjutan penanggulanga kemiskinan agar masyarakat atau individu miskin dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh lagi kedalam kemiskinan. Program berbasis pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari :

1. Pelatihan Otomotif
2. Menjahit
3. Bordir
4. Pengelasan
5. Manajemen Kewirausahaan
6. Pelatihan sektor pertanian

Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat didorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Daerah masing-masing. Sehingga program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin. Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial, mengatakan bahwa:

“Memposisikan masyarakat miskin sebagai objek yang tidak berdaya dengan lebih banyak memberikan bantuan ketimbang memberdayakan akan menciptakan ketergantungan, melemahkan daya inovatif, kreatifitas, dan daya juang serta daya saing masyarakat. Kami melihat pemberdayaan masyarakat sebagai kunci untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, kami fokus pada pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat untuk bekerja. Pelatihan yang kami adakan mencakup berbagai sektor seperti pertanian, dan kerajinan tangan. Kami juga memastikan bahwa setiap program yang kami jalankan mencakup semua lini seperti program pemberdayaan khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan potensi mereka.”<sup>32</sup>

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Suka Jadi bahwa:

“pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menekan angka kemiskinan juga melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan-pelatihan untuk mendukung dan mengasah keterampilan masyarakat. Hal ini sangat bermanfaat dan disambut hangat oleh warga desa Suka Jadi”<sup>33</sup>

Informasi lainnya juga di dapatkan peneliti dengan mewawancarai kepala Desa Syura Jadi yang menyebutkan bahwa:

“ Dalam menekan angka kemiskinan pemerintah di Kabupaten Bener Meriah ini melakukan beberapa upaya salah satunya ialah upaya pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan seperti menjahit, Bordir, ini bisa mengasah kemampuan masyarakat di sini dan Masyarakat di sini sangat antusias saat mengikuti pelatihan”<sup>34</sup>

<sup>32</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

<sup>33</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Suka Jadi, pada tanggal 25 oktober 2023

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura, Pada tanggal 24 oktober 2023



Selain itu informasi juga di dapat kan peneliti dengan mewawancarai kepala desa Syura Jadi mengatakan bahwa:

“Ada beberapa program pelatihan yang di berikan pemerintah seperti pelatihan di bidang pertanian di karenakan mayoritas penduduk di Desa Bukit Pepanyi ini petani kopi jadi sangat bagus, kerana adanya pelatihan yang mengenai praktik pertanian kopi untuk meningkatkan keterampilan petani – petani kopi di sini dan pelatihan ini di sambut hangat oleh masyarakat di sini.”<sup>35</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Bener Meriah juga menambahkan bahwa:

“Program yang yang diberikan itu ada beberapa yang saya tau itu menjahit ada sangat membantu”<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa informan peneliti menganalisis bahwa pemerintah sudah memberika beberapa program pelatihan seperti menjahit,bordir dan juga pelatihan sektor pertanian yang sudah di jalankan di beberapa desa yang ada di Kabupaten bener meriah.

Berikut merupakan gambar Program pelatihan Keterampilan:



**Gambar 4. 5 Program Pelatihan Keterampilan**

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada Tanggal 25 oktober 2023

<sup>36</sup> Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 19 desember



*Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2023*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan dia atas, terlihat bahwa Kolaborasi dan partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dari upaya Dinas Sosial dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah. Dinas Sosial tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berfokus pada peningkatan keterampilan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun Pelatihan yang dilakukan mencakup pertanian, dan kerajinan tangan.

c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Selain program kemiskinan berbasis pemberdayaan, ada juga program kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro atau kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dimana Pemerintah memberikan penyediaan permodalan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Bener Meriah mengatakan bahwa :

“Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang di lakukan secara berkelompok yang di bagikan dalam beberapa kelompok Dimana ada kelompok yang di bagikan mesin jahit dan juga alat memasak. di setiap daerah termasuk Kabupaten Bener Meriah menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bener Meriah.”<sup>37</sup>

Selain itu Kepala Desa Bukit Pepanyi dalam hasil wawancara

---

<sup>37</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

menyebutkan bahwa:

“Dengan adanya program bantuan UEP ini, saya selaku Kepala Desa merasa senang karena dengan di bagikannya mesin jahit dan alat memasak hal tersebut bisa dijadikan alat untuk mengasah skill masyarakat .”<sup>38</sup>

Informasi lainnya juga peneliti peroleh dengan mewawancarai kepala desa

Suka jadi terkait tentang Usaha ekonomi Produktif menyebutkan bahwa :

“Program bantuan UEP ini sangat bermanfaat di kalangan Masyarakat karena dengan adanya program ini Masyarakat menjadi lebih bersemangat untuk belajar menjahit ataupun membuat kue, karena program UEP ini di bagikan dalam bentuk barang seperti mesin jahit dan juga alat dan bahan untuk membuat kue ataupun memasak.”<sup>39</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Syura Jadi terkait tentang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah pasti menjadi garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat dengan adanya program UEP ini Saya selaku kepala desa merasa sangat senang karena adanya program ini menjadi salah satu program yang sangat di senangi Masyarakat di desa sini, selain bisa mengasah skill masyrakat disini, semoga kedepannya juga bisa menjadi modal awal untuk Masyarakat di sini membuka usaha mereka sendiri”<sup>40</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat menambahkan bahwa:

“saya terbantu dengan adanya program pemerintah ini, sehingga saya bisa membuka usaha dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Menumbuh kembangkan UEP tersebut dinilai sangat erat karena dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dalam penyediaan modal usaha dengan mudah. Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan masyarakat desa, yaitu pemberdayaan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

<sup>39</sup> Wawancra dengan Kepala Desa Suka Jadi, Pada tanggal 25 Oktober 2023

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

<sup>41</sup> Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 19 desember

masyarakat desa dalam rangka proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

d. Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Program-program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu :

- 1) Bantuan alat dan bibit pertanian
- 2) Perikanan, perkebunan dan peternakan
- 3) Bantuan zakat produktif konsumtif

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa :

“Pemberian bantuan dan bibit pertanian dari pemerintah berupa pupuk, rehabilitasi kebun terlantar dan pengembangan kebun kopi. Bantuan ini bertujuan untuk menunjang ekonomi Masyarakat dari hasil pertaniannya sendiri. Selain itu, ada juga bantuan ternak berupa ayam, ikan dan bebek, Pemberian ternak tersebut sangat menguntungkan, karena dapat dikembang biakkan.”<sup>42</sup>

Selain itu Kepala Desa Bukit Pepanyi dalam hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“program lain yang di berikan pemerintah kepada Masyarakat ialah berupa bantuan alat dan bibit petanian di karenakan mayoritas di sini petani kopi maka bantuan yang kami dapatkan berupa berupa pupuk dan bibit cabe yang bisa di tanam di sela sela pohon kopi dengan adanya bantuan ini semogara masyarakat di sini semakin bersemangat untuk bekerja lebih giat lagi”<sup>43</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Suka Jadi terkait tentang program penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa:

<sup>42</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, pada Tanggal 24 Oktober 2023

“Masyarakat di desa suka jadi ini merupakan masyarakat desa yang mayoritas penduduknya bukan hanya menjadi petani kopi saja ada juga yang emang bekerja sebagai petani bawang merah, cabe rawit, dan juga tomat. Maka dengan adanya bantuan yang di berikan pemerintah berupa pupuk, bibit dan juga mulsa, maka bisa menjadi acuan mereka untuk bekerja lebih giat dan bersemangat lagi”<sup>44</sup>

Informasi lainnya juga peneliti peroleh dengan mewawancarai kepala desa Syura Jadi terkait tentang program penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa :

“Dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat maka Pemerintah membagikan beberapa bantuan yang berguna untuk Masyarakat di sini seperti pemerintah memberikan bantuan pupuk untuk kopi juga bebek dan ayam potong yang di bagikan sebanyak 5 ekor per kk dengan di berikan bantuan tersebut maka bisa menjadi modal awal untuk Masyarakat di sini memulai usaha”<sup>45</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat menambahkan bahwa:

“Ya sangat baik ya ada bantuan beberapa modal itu diberikan pupuk juga ada banyak lagi”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Program lainnya ini di bertujuan agar warga miskin memiliki pekerjaan dan usaha yang layak, sehingga pengangguran yang ada dapat mengalami penurunan. Dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kebutuhan yang terpenuhi bagi warganya merupakan suatu keberhasilan pemerintah atas kinerja dan juga program-program yang diterapkan.

## 2. Kemiskinan

Untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Suka Jadi, pada Tanggal 25 Oktober 2023

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi, pada tanggal 24 Oktober 2023

<sup>46</sup> Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 19 desember

Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan upaya verifikasi penerima bantuan agar sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu kondisi tempat tinggal dan pendidikan, sebagai alat evaluasi dan seleksi untuk menentukan kelompok yang membutuhkan bantuan dengan prioritas tertinggi.

a. Tempat Tinggal

Kriteria kemiskinan ekstrem berdasarkan tempat tinggal mencakup kondisi geografis dan infrastruktur di suatu wilayah sebagai indikator utama. Faktor-faktor seperti tingkat aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dasar, dan kondisi perumahan menjadi pertimbangan kritis dalam menentukan tingkat ekstrem kemiskinan di suatu wilayah.

Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti bersama Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, menjelaskan bahwa:

“Tempat tinggal menjadi salah satu indikator kami untuk menjalankan strategi penekanan angka kemiskinan ekstrem. Untuk kriteria itu sendiri kami evaluasi dari kondisi perumahan itu sendiri apakah rumah tersebut layak dihuni, kemudian aksesibilitasnya seperti mudahnya menjangkau fasilitas kesehatan, dan juga kondisi sanitasi yang memadai seperti ketersediaan air bersih dan air layak minum. Jika terdapat kondisi rumah seperti maka kami berkoordinasi dengan instansi-instansi lain memberikan bantuan berupa perbaikan rumah layak huni.”<sup>47</sup>

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi menyebutkan bahwa :

“Perbaikan rumah layak huni diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat yang layak untuk mendapatkannya dengan proses verifikasi dan koordinasi pihak desa tentunya untuk menghindari

---

<sup>47</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

terjadinya bantuan salah target.”<sup>48</sup>

Senada dengan itu hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Suka Jadi menyebutkan bahwa :

“Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu kriteria miskin, oleh karenanya pihak desa selalu memantau perkembangan masyarakat dan melaporkan kepada pihak terkait bahwa benar atau tidaknya masyarakat tersebut miskin dan layak untuk dibantu. Program pemerintah seperti renovasi rumah merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menekan sekali masyarakat dengan rumah tidak layak huni.”<sup>49</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Syura Jadi terkait tentang tempat tinggal menyebutkan bahwa:

“Tempat tinggal merupakan tempat kita pulang dan beristirahat, maka dengan adanya bantuan seperti rumah layak huni sangat lah berguna bagi masyarakat di sini dan juga program seperti renovasi rumah ini merupakan Langkah yang sangat tepat yang di ambil pemerintah.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas maka peneliti menganalisis bahwa pemerintah memberikan bantuan rumah layak huni dan juga renovasi rumah dengan memfasilitasi ketersediaan air bersih, air layak minum, dan sanitasi yang layak.

Berikut ini merupakan gambar renovasi rumah layak huni di Kabupaten Bener Meriah:

<sup>48</sup> Wawancara dengan kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada tanggal 25 Oktober 2023

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Suka Jadi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi pada tanggal 25 Oktober 2023



**Gambar 4. 6 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni**

*Sumber: Dinas Sosial, 2023*

Berdasarkan dokumen tersebut diatas peneliti dapat menganalisa bahwa hasil Dinas Sosial sangat serius dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah serta sangat memperhatikan aspek penting yaitu tempat tinggal. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga mengimplementasikan bantuan berupa renovasi rumah bagi warga miskin, program ini tentunya berkolaborasi bersama unsur terkait lintas sektor yang diharapkan dapat berjalan dengan maksimal.

b. Pendidikan

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat mudah untuk tercapai. Menurut Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa:



“Pendidikan adalah yang utama yang harus di dapat oleh setiap warga Negara, yang mana pendidikan dapat memerangi segalanya, yaitu seperti kebodohan, kemiskinan, dan ketidaktahuan yang dapat menyebabkan kita dibodohi oleh yang sesama. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sendiri memiliki program di bidang pendidikan, untuk mendorong setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, serta dapat saling membagi ilmu tersebut.”<sup>51</sup>

Individu dengan pendidikan rendah memungkinkan untuk memiliki akses terbatas kepeluang pekerjaan yang berkualitas dan berpenghasilan tinggi. Masyarakat dengan SDM rendah dapat mengakibatkan pendapatan yang rendah dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi menyebutkan bahwa:

”Pendidikan rata-rata masyarakat didesa ini lulusan SMA kebanyakan masyarakat bertani “sebagai penghasilan utamanya. Pendidikan berkorelasi dengan kurangnya keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan dipekerjakan. Itulah alasannya masyarakat mengalami kesulitan dalam hal pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari mata pencaharian utamanya sebagai petani kopi yang tidak menentu hasilnya.”<sup>52</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Suka Jadi terkait tentang Pendidikan menyebutkan bahwa:

”pendidikan merupakan acuan awal untuk menghasilkan SDM yang baik, masyarakat di desa ini kebanyakan hanya lulusan SMP,dan SMA. Masyarakat disini menjadi kan petani Kopi sebagai mata pencarian pokok, di karenakan kurangnya keterampilan dan juga cara mengelola kopi maka membuat ekonomi yang tidak maju-maju.”<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada Tanggal 25 Oktober 2023

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Suka jadi, pada tanggal 25 oktober 2023



Informasi lainnya juga peneliti peroleh dengan mewawancarai kepala desa

Syura Jadi Tentang Pendidikan menyebutkan bahwa:

“Masyarakat di desa ini kebanyakan lulusan SMA dan bahkan ada yang tidak tamat sekolah dasar pun di akibatkan faktor lingkungan akibatnya ya seperti ini masyarakat hanya fokus mencari nafkah dari hasil panen mereka yang tidak menentu hasilnya”<sup>54</sup>

Kemudian Kabid Pemberdayaan Sosial juga menambahkan bahwa:

“Kami menetapkan kriteria pendidikan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu. Kami melihat apakah mereka telah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Dalam rangka menetapkan itu kami menggunakan ijazah atau sertifikat resmi yang menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dicapai. Untuk programnya sendiri kami memiliki program khusus untuk mendukung pendidikan anak-anak dan remaja dimana mencakup bantuan pendidikan seperti perlengkapan sekolah, biaya sekolah, dan program pengembangan keterampilan.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki korelasi dengan mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Maka daripada itu Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah merespons dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan mencakup perlengkapan sekolah, biaya sekolah, dan program-program pelatihan.

#### **4.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambatan Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah**

<sup>54</sup>Wawancara dengan kepala Desa Syura Jadi, Pada tanggal 24 oktober 2023

<sup>55</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

Setiap rencana atau strategi yang disusun, baik dalam konteks bisnis, pembangunan, maupun perubahan organisasi, tidak terlepas dari pendukung dan penghambat dalam tahap penerapannya. Meskipun diatas kertas sebuah rencana mungkin terlihat mulus dan terperinci, kenyataannya, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya atau perubahan kondisi eksternal dapat menghambat kelancaran implementasi.

## **1. Faktor Pendukung Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem**

### **a. Anggaran**

Pada kasus penanganan kemiskinan ekstrem berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang kemudian direspon dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

Dari elaborasi diatas, dapat diindikasikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023, bahwa

pemerintah Aceh mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) sebagai bagian dari insentif fiskal. Dana tersebut khususnya disediakan untuk mendukung pencapaian target dan kinerja pemerintah daerah terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama kepala bidang pemberdayaan sosial dinas sosial Kabupaten Bener Meriah menyebutkan bahwa:

“Dengan tersedianya anggaran diharapkan dapat menekan kemiskinan di Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah. Tujuan alokasi dana tersebut adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.”<sup>56</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem peneliti dapat menganalisa bahwa dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan jumlah kemiskinan akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Selain itu, pembangunan infrastruktur maupun nilai sosial budaya Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat.

## **2. Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem**

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu

---

<sup>56</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.<sup>57</sup> Dengan kata lain, hambatan menjadi faktor yang mempersulit perjalanan individu menuju pencapaian tujuan mereka. Dengan kata lain, hambatan menjadi faktor yang mempersulit perjalanan individu menuju pencapaian tujuan mereka.

Dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah, hambatan dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan menghambat upaya penanganan kemiskinan ekstrem adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kemiskinan ekstrem. Kesadaran ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat dan keterbatasan anggaran Dinas Sosial.

a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Kesadaran memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di masyarakat. Kesadaran individu tidak hanya menjadi fondasi untuk perkembangan keahlian dan potensi secara pribadi, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kesadaran akan Pendidikan akan mengubah pola pikir masyarakat untuk dapat hidup lebih sejahtera dan memutus rantai kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Terkait faktor penghambat ini memberikan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Sherly Septia Suyedi, Yenni Idrus, "Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP", *Jurnal Seni Rupa*, Vol 8 No. 2, (2019), Hal. 124

“Tingkat pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan peluang individu untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Kami menyadari bahwa pendidikan bukan hanya hak dasar, tetapi juga merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung menghadapi tantangan ekonomi yang besar.”<sup>58</sup>

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Sosial memahami peran krusial kesadaran akan pendidikan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan tengah menjalankan berbagai program untuk memitigasi hambatan tersebut. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi menyebutkan bahwa:

“Kami telah melakukan sosialisasi kerumah-rumah mengajak masyarakat untuk ikut peran aktif baik dalam pendidikan dan kegiatan ketrampilan pelatihan maupun lainnya. Namun banyak yang tidak datang dengan berbagai alasan untuk tidak ikut serta, kami telah berusaha mengajak dan memberikan penjelasan bagi mereka namun tetap kesadaran akan pentingnya peningkatan keterampilan diri dan keluar dari kemiskinan masih rendah.”<sup>59</sup>

Selain itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi menyebutkan bahwa:

“Sulitnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memerangi kemiskinan di dalam kehidupannya merupakan salah satu hambatan yang di hadapi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut, orientasi mereka hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana, dan tersebut tidak diproduktifkan.”<sup>60</sup>

Informasi lainnya juga peneliti peroleh dengan mewawancarai kepala desa Suka Jadi terkait tentang kesadaran masyarakat menyebutkan bahwa:

“Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam membangun kesadaran masyarakat dengan membuat berbagai program pelatihan tetapi hasilnya tetap sama di karenakan masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan

---

<sup>58</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 23 Oktober 2023

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

pelatihan tersebut kalo pun dating mereka hannya ikut partisipasi di hari pertama saja.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pendidikan yang rendah menjadi penghambat dan mempengaruhi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah. Tingkat kesadaran yang rendah membatasi peluang pengembangan diri berkontribusi pada rentannya individu terhadap kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pendidikan di suatu masyarakat dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dan menciptakan dasar yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Lapangan Kerja

Banyaknya masyarakat pengangguran maupun buruh lepas di Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu penghambat hal ini. Hal ini terjadi dikarenakan sedikitnya lapangan kerja dan rendahnya pendidikan baik keterampilan maupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan Pemerintah Daerah memiliki hambatan yang harus diselesaikan yaitu masih banyaknya pengangguran yang disebabkan rendahnya lapangan kerja dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Rendahnya semangat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan agar masyarakat Kabupaten Bener Meriah dapat keluar dari zona kemiskinan.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Suka Jadi, pada tanggal 25 Oktober 2023

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa Suka

Jadi, menyebutkan bahwa:

“Masyarakat di Desa Suka Jadi masih kebanyakan tamatan SMP dan SMA mereka lebih senang bekerja sebagai petani kopi. Bagi mereka pendidikan masih belum penting. Karena yang kami lihat rata-rata tingak ekonomi masyarakat rendah. Dan itu yang membuat mereka malas sekolah lebih baik kerja untuk mendapatkan penghasilan.”<sup>62</sup>

Informasi lainnya juga peneliti peroleh dengan mewawancarai kepala desa

Syura Jadi terkait tentang lapangan Pekerjaan menyebutkan bahwa:

“pemerintah sudah menyediakan lapangan kerja tapi yang menghambat mereka mendapat pekerjaan yang layak karna SDM yang dimiliki masih kurang, sehingga mereka memilih menjadi petani kopi”<sup>63</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai kepala Desa Bukit Pepanyi yang menyebutkan bahwa:

“memang sebagian besar Masyarakat disini lebih memilih menjadi petani kopi, karna ingin melanjutkan usaha keluarga, sehingga anak-anak hanya melanjutkan Pendidikan sampai SMA saja, padahal jika mereka mau, pemerintah sudah menyediakan lapangan kerja, namun tetap saja kesadaran Masyarakat masih begitu minim”<sup>64</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan Kabupaten Bener Meriah ini rendah akan sumber daya manusia dapat dikatakan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah masih rendah dikarenakan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Stretegi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem telah

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Suka Jadi, Pada Tanggal 25 Oktober 2023

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Syura Jadi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Pepanyi, Pada Tanggal 24 Oktober 2023

diimplementasikan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, itu dibuktikan dengan beberapa prrogram yang telah berjalan seperti Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis PemberdayaanUsaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya. Namun dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah juga terddapat kendala yakni tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan dan peembangan diri masih sangat rendah sehingga hal tersebut membuat masyarakat selalu berjalan dibawah angka kemiskinan. Faktor penghambat selanjutnya ialah keterbatasan lapangan pekerjaan yang disebabkan rendahnya SDM masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dengan selalu bekejasama lintas sektor guna dapat memaksimalkan percepatan pemulihan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah.

#### **4.2 Pembahasan Penelitian**

Setelah menguraikan hasil penelitian yang telah melalui proses seleksi data, dalam tahap ini peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap temuan penelitian dengan merujuk pada kerangka teoretis yang telah dijelaskan pada Bab II. Tujuan dari analisis adalah untuk menghasilkan jawaban yang lebih valid terhadap rumusan masalah yang diajukan. Proses analisis ini melibatkan penerapan konsep-konsep teoretis yang relevan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih akurat dan mendalam. Dengan memadukan data empiris



dengan landasan teoretis, diharapkan dapat tercipta suatu pemahaman yang lebih komprehensif dan valid terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **4.2.1 Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bener Meriah**

Strategi merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu mencapai tujuan dengan tepat. Kemudian strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi yang diteliti dalam penelitian ini merupakan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam instruksi tersebut Menteri Sosial maupun Dinas Sosial menerima instruksi untuk:

- a. Melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil assessment

- c. Mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi para penerima manfaat.<sup>65</sup>

Merujuk pada hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah khususnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah ialah memberikan program bantuan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

- a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Dalam ranah penanggulangan kemiskinan ekstrem, kategori strategi yang pertama, diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah mencakup pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai dan non-tunai. Bantuan Tunai terdiri dari BLT, Sembako murah dua kali dalam setahun, Pembangunan rumah layak huni (RLH), Beasiswa keluarga miskin, Bantuan sosial peralatan sekolah keluarga miskin dan penyandang cacat, Bantuan rumah tangga miskin, lansia terlantar Rp, 200.000, perbulan Serta bantuan sosial kepada yatim piatu dan lainnya.

Bantuan-bantuan penanggulangan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dan tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Konsep kemiskinan ekstrem mengacu pada suatu keadaan dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan ekstrem adalah tingkat pendapatan di bawah batas minimum harian sebesar Rp. 9000.

---

<sup>65</sup> Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem

b. Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pencegahan dimaksudkan untuk mencegah faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Strategi pencegahan yang diterapkan mencakup serangkaian program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk merangsang peningkatan peluang pekerjaan, membuka akses ke sumber daya ekonomi yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui pelatihan keterampilan secara berkelanjutan seperti pelatihan pertanian, kerajinan tangan dan layanan. Dari hasil penelitian pula didapati bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Bener Meriah hanya lulusan SMA sederajat, karena terbatasnya SDM serta keterampilan menyebabkan masyarakat memilih untuk bertani kopi sebagai mata pencarian utama yang tidak menentu hasilnya.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Sosial dengan menyediakan bantuan pendidikan, yang mencakup distribusi perlengkapan sekolah serta dukungan biaya pendidikan. Dengan demikian, strategi pencegahan ini dirancang untuk menciptakan fondasi yang kokoh dalam masyarakat, dengan memberikan dukungan secara holistik yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek pendidikan yang vital untuk meningkatkan kesejahteraan dan meredam potensi kemiskinan di masa mendatang.

Keberhasilan dari implementasi program ini diharapkan mampu menghambat laju pertumbuhan yang angka kemiskinan ekstrem di wilayah

Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan ini mencerminkan upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan yang bersifat langsung dan tidak langsung.

#### **4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah**

Sebuah perencanaan yang baik harus mampu mengidentifikasi potensi hambatan dan menyertakan strategi untuk mengatasinya. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasional menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses penerapan. Oleh karena itu, kesadaran akan kompleksitas dan dinamika dalam penerapan rencana menjadi langkah penting dalam mencapai kesuksesan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung berjalannya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah ialah dukungan Anggaran Pemerintah yang sangat serius dalam mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan di Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana diketahui, alokasi dana daerah merupakan bagian dari sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan, pada dasarnya, merupakan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dan dialokasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mendukung

pelaksanaan kebijakan desentralisasi.<sup>66</sup> Mekanisme ini memberikan landasan finansial bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, mengembangkan infrastruktur, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan daerah. Hal ini menyiratkan bahwa alokasi dana tersebut mungkin masih belum mencukupi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh khususnya di Kabupaten Bener Meriah.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, Kesadaran yang kurang akan manfaat jangka panjang dari inisiatif penanggulangan tersebut, serta penolakan terhadap perubahan, dapat mengakibatkan lambatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan holistik yang memperhitungkan dinamika sosial dan budaya setempat dalam merancang kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan, guna memastikan partisipasi yang efektif dan berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat.

Faktor yang menghambat pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah bukan pada keterbatasan anggaran pemerintah, melainkan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bener Meriah yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan,

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

rendahnya SDM membuat masyarakat tidak mampu bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Suatu pemahaman yang umum bahwa individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata cenderung mempertahankan kondisi tersebut sepanjang hidup mereka. Kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik seringkali dipandang sebagai langkah yang sulit, terutama ketika individu tersebut mungkin kurang dorongan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan enggan untuk membuka diri terhadap peluang baru. Terlebih lagi, ada kecenderungan yang kuat untuk mengikuti pola hidup yang sudah ada, seperti menjadi petani jika berasal dari keluarga petani.

Faktor-faktor seperti kemauan hidup yang lebih baik, kesadaran akan pentingnya pendidikan, keterbukaan terhadap perubahan, sempitnya lapangan pekerjaan yang disebabkan kuangnya SDM dan tidak ada keberanian untuk mengatasi stigma sosial, seperti stereotip bahwa anak dari keluarga petani akan menjadi petani pula, menjadi kunci yang mampu membuka pintu kesejahteraan dan memutuskan siklus kemiskinan. Oleh karena itu, tanpa adanya pemahaman dan kesadaran yang memadai di kalangan masyarakat akan sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baik. tentang manfaat jangka panjang dari berbagai program dan bantuan pemerintah, upaya mengatasi kemiskinan ekstrem akan dihadapkan pada kendala yang serius.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas terkait Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah melakukan kinerja yang sangat baik, dengan mengimplementasikan strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan regulasi yang ada. Terdapat empat strategi utama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah jalankan, yaitu Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya. Strategi penanggulangan dirancang untuk meminimalkan dampak yang telah timbul dari kemiskinan ekstrem, hal ini sangat berdampak positif bagi masyarakat dan diharapkan bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Berjalannya program tersebut juga tidak lepas dengan adanya Koordinasi yang di lakukan untuk penanggulangan kemiskinan daerah, sehingga program-program kemiskinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan.
2. Faktor Penghambat dalam upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menangani kemiskinan ekstrem yakni tingkat kesadaran masyarakat

akan pendidikan dan perkembangan diri masih sangat rendah sehingga hal tersebut membuat masyarakat selalu berjalan dibawah angka kemiskinan. Selain itu, faktor penghambat selanjutnya ialah aspek sosial budaya, dalam konteks ini kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang dari program pemerintah masih terkendala, menghambat partisipasi mereka dalam upaya-upaya yang ditawarkan. Persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga dapat menjadi hambatan, menyulitkan usaha untuk mengakhiri perpetuasi kemiskinan karena pendidikan dianggap sebagai faktor kunci dalam keluar dari lingkaran kemiskinan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran terhadap Strategi Pemerintah Kabupaten dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah, yaitu:

1. Diharapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mampu mengoptimalkan alokasi dana untuk penanganan kemiskinan ekstrem secara lebih efisien, cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang dapat memberikan kontribusi maksimal dengan mengarahkan perhatian pada aspek-aspek substansial.
2. Diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program-program pemerintah yang bertujuan mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah. Peran serta aktif dari masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kesuksesan implementasi program-program tersebut. Partisipasi



masyarakat bukan hanya dianggap sebagai elemen pendukung, melainkan juga sebagai faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku & Jurnal:**

- Ahmad. (2020). *Manajemen Strategis*. Makassar: Media Pustaka.
- Chatim, N. (2016). *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Donni, P. J. (2017). *Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faisal, Sanafiah, (2007), *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Gilarso. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kansil. (2017). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Leasiwal, C. (2017). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Universitas Pattimura*, 1-17.
- Leo, A. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Meneth. (2018). *Pengembangan Masyarakat Desa*. Medan: Usu Press.
- Mulyono, S. E. (2017). *Kemiskinan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugraha, S., & Maulina. (t.thn.). *Kamus Besa Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Nasikun,(2018), *Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta
- Notoatmodjo, (2013), *Metodelogi Penelitian*, Rake Sarasin.
- Robert Lawang, (2012), *Buku Materi kemiskinan*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rachman, B. A. (2023). *Strategi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam Mendapatkan Penghargaan Pelayanan Prima Grade A*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Sorjono, S. (2003). *Perkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Kemiskinan dan Perlindungan sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suyedi, S. S., & Idrus, Y. (2019). Hambatan-Hambatan Belajar yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP. *Jurnal Seni Rupa*, 118-132.

**Websites:**

<http://kbbi.web.id> diakses pada 12 September 2023 pukul 11.15

<https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/modul-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem> diakses 12 September 2023

**Peraturan:**

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 600/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Perimbangan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **07 Februari 2023**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Nasrul Hadi, S.E., MM. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Ainil Farhani

NIM : 190802072

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Tanggal : 01 Maret 2023  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN,**  
**MUJI MULIA**

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Sosial;
  5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  6. Menteri Agama;
  7. Menteri Kesehatan;
  8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  13. Menteri Ketenagakerjaan;
  14. Menteri Perindustrian;
  15. Menteri Pertanian;
  16. Menteri Kelautan dan Perikanan;

17. Menteri . . .

SK No 146187 A

### Lampiran 3 Surat Izin Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU**  
**PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-1943/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/10/2023  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*


Kepada Yth,  
 Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AINIL FARHANI / 190802072**  
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Desa Bukit Pepanyi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener meriah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Oktober 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




*Berlaku sampai : 27 Maret 2024*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>
06/10/23, 19:58  
Halaman 1 dari 1



## Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS SOSIAL**  
*Jl. Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu – Redelong*  
*<http://dinsos.benermeriahkab.go.id>, e-mail : [dinsos@benermeriahkab.go.id](mailto:dinsos@benermeriahkab.go.id)*

---



**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 460/ 418 /2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  
 Nama : **Ir. MAHMUDDIN, M.A.P**  
 Nip : 19650624 199803 1 004  
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah  
 Alamat instansi : Jl. Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu - Redelong

Dengan ini Menerangkan Bahwa :  
 Nama : **AINI FARHANI**  
 NIM : 190802072  
 Semester : IX  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.  
 Alamat instansi : Desa Bukit Pepanyi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

Benar telah mengadakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 09 Oktober 2023 guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah”**

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Redelong, 10 Oktober 2023  
**Kepala Dinas Sosial**  
**Kabupaten Bener Meriah**  
  
  
**Ir. MAHMUDDIN, M.A.P**  
 Pembina Utama Muda. IV/c  
 NIP. 19650624 199803 1 004

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Sub  
BagianPemberdayaan Sosial  
Dinas Sosial Kabupaten Bener  
Meriah



Wawancara dengan Kepala  
DesaBukit Papanyi



Wawancara dengan  
Kepala DesaBukit  
Syura Jadi



Wawancara dengan Kepala  
DesaBukit Suka Jadi